



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SLAMET EDY PURNOMO
2. Jabatan : ANGGOTA VII BPK RI
3. NHK : 199393

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **26.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 419 m²/400 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 7.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 281 m²/170 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 5.600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 801 m²/480 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m²/240 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
5. Tanah Seluas 58 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **1.908.500.000**

1. MOBIL, LEXUS MPV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, PIAGGIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOBIL, HYUNDAI IONIC 5 SEDAN Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 790.000.000
5. MOBIL, TOYOTA SUV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **170.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	6.433.116.794
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.960.805.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	39.172.421.794
III. HUTANG	Rp.	580.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	38.592.421.794

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.